

# KOMUNIKASI

Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

## KOMUNIKASI DAN JATI DIRI BANGSA

- ❑ Mengembangkan Jati Diri Bangsa Melalui Komunikasi  
Dr. Leila Mona Ganiem
- ❑ "Wujud Nasionalisme Dalam Siaran Politik TV Lokal"  
Prof. Dr. Atie Rachmiate, Msi
- ❑ Komunikasi Politik dan Jati Diri Bangsa:  
Bagaimana Kompetensi Partisipatif Warga Terbentuk ?  
Dr. Karim Suryadi, Msi
- ❑ Komunikasi Antarbudaya Antara Orang Cina  
dengan Komunitas Beragam Etnik di Singkawang  
Dr. Netty Herawati, Msi
- ❑ Manajemen Konflik Berbasis Budaya Lokal  
Sebagai Upaya Meningkatkan Jati Diri Bangsa Indonesia  
Dr. Puji Lestari, Rr. Susilastuti DN, dan Retno Hendariningrum

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982  
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)

**JURNAL IKATAN SARJANA INDONESIA**  
**Komunikasi Dan Jati Diri Bangsa**

SK. Men.Pen. R.I. Nomor: 1698/SK/Ditjen PPG/STT/1991  
Diterbitkan oleh ISKI  
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Desain Sampul & Layout  
Triwahyuda & Yulianto

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit

**ISSN 0853-4470**

# Manajemen Konflik Berbasis Budaya Lokal Sebagai Upaya Meningkatkan Jati diri Bangsa Indonesia

Puji Lestari, Rr. Susilastuti DN, Retno Hendariningrum

## Abstrak

*Bencana gempa bumi di DIY pada 27 Mei 2006 masih meninggalkan berbagai konflik di masyarakat. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi berbagai jenis dan penyebab konflik, mulai dari tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Jenis konflik yang terjadi antara lain: konflik intrapersonal (dalam diri individu), antarpersonal (antarindividu), dalam kelompok (masyarakat, pemerintah, pendonor). dan antarkelompok masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pendonor, dll. Penyebab konflik secara umum antara lain ketidakjelasan informasi, sumber daya/dana terbatas, pelaksanaan tugas yang saling tergantung, penghalang komunikasi (jarak, teknologi), perbedaan watak atau persepsi individu. Penelitian ini mempunyai makna penting karena menemukan pola manajemen konflik berbasis nilai-nilai budaya lokal sebagai sarana untuk mengembangkan jati diri bangsa Indonesia. Pola kompromi adalah pola yang dominan dilakukan untuk mengatasi konflik berdasarkan nilai-nilai budaya lokal (Yogyakarta) sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain : (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (5) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (6) nilai semangat khas keyogyakartaan. Diyakini, pola tersebut dapat diterapkan untuk menangani konflik komunikasi sosial pada kasus-kasus bencana yang lain.*

*Kata kunci : Manajemen konflik, bencana, jati diri bangsa, nilai-nilai budaya Yogyakarta*

## 1. Pendahuluan

Konflik sosial sering terjadi pada masyarakat. Konflik dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya berbagai kesulitan komunikasi di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang atau pengganggu tercapainya tujuan masing-masing pihak. Secara umum konflik merupakan perselisihan yang berkaitan dengan perbedaan tujuan, pengalokasian

sumber daya yang kurang seimbang, dan distribusi kebijaksanaan serta prosedur yang kurang tepat. Secara emosional konflik terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya, tidak simpatik, takut dan penolakan, serta adanya pertentangan antar pribadi. Konflik adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita, konflik senantiasa mengikuti mereka. Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak

menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam masyarakat (Sriyanto, 2007).

Konflik dalam masyarakat juga muncul pasca gempa di DIY 2006. Sumber konflik sangat beragam. Ada konflik yang diakibatkan oleh pembagian sumbangan sembako yang tidak merata, karena bantuan dari pemerintah yang lamban, bahkan ada bantuan yang salah sasaran, dan berbagai sumber konflik sosial akibat pemberian dana rekonstruksi dari pemerintah. Sebagai contoh, kasus konflik sosial di Desa Tirtosari Kretek Bantul, bahwa kesalahan menentukan kriteria penerima dana rekonstruksi menimbulkan keresahan warga dan memicu ancaman perpecahan di kalangan masyarakat (*Kedaulatan Rakyat*, 29 November 2006).

Bahkan setahun pasca gempa pun konflik antara masyarakat dan pemerintah masih sering terjadi, misalnya di Bantul Yogyakarta:

"...Ketidakadilan pembagian dana rekonstruksi kembali terjadi di Bantul, yaitu warga Mangir Kidul, desa Sumpersari kec. Pajangan berunjuk rasa di kantor Kelurahan Sumpersari pada hari Senin 12 Februari 2007, menuntut kepala Dusun mereka mundur. Kadus terbukti tidak adil pada pembagian dana BLMP, yaitu sengaja memasukkan nama sanak familinya sebagai anggota kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan rekonstruksi, padahal masih banyak rumah warga yang rusaknya lebih parah tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan rekonstruksi. Di samping kasus dana rekonstruksi, Suyud juga terlibat dalam proses pemberian bantuan lainnya seperti beras, dsb. Puncak kemarahan warga berdampak pada tuntutan agar Suyud mengundurkan diri dari Kadus dan ancaman akan keselamatan jiwa Suyud bila tidak mundur dari jabatannya. Desakan warga ditanggapi oleh kepala Desa yang menonaktifkan Suyud sampai saat yang

belum ditentukan, sambil menunggu keputusan dari pemerintah..." (*Kompas*, 13 Februari 2007).

Konflik komunikasi sosial ada yang bersifat sementara dan ada yang berkepanjangan, bahkan konflik yang terjadi menyebabkan hubungan keluarga menjadi retak seperti data berikut:

Saya sebagai salah seorang yang selamat pada saat kejadian berusaha menolong anak untuk segera di bawa ke rumah sakit. Saya juga menolong tetangga yang membutuhkan. Namun saya tidak menolong isteri karena dia juga selamat. Cuma ketika kembali dari menolong anak dan warga saya "dijotak" (didiamkan-red) oleh isteri dengan tidak diajak bicara sehari-hari. Bayangkan dalam situasi gempa malah tidak diajak bicara isteri karena saya dianggap suami yang tidak ingat isteri..." (Widodo Supranoto, dari Imogiri, Bantul dalam FGD tanggal 20 Juni 2008).

Konflik yang muncul berkaitan dengan gempa tidak hanya pada saat bantuan rekonstruksi digulirkan tetapi juga sudah muncul pada saat pendistribusian bantuan pada saat tanggap darurat. Konflik ini muncul terutama di wilayah yang tingkat kerusakan tidak merata, sehingga masyarakat menuntut agar bantuan yang didistribusikan dibagi merata. Konflik bencana terjadi karena manajemen komunikasi bencana yang masih buruk (Lestari, 2007:198). Sebenarnya sudah ada undang-undang dan peraturan tentang bencana, tetapi belum disertai mekanisme pelaksanaan yang koheren terutama di tingkat daerah (*Tim Jurnal Kebijakan Publik*, Depkominfo, 2008:47).

Setelah dana bantuan rekonstruksi tahap I turun, ternyata tetap menyisakan masalah karena terkait dengan validasi verifikasi kerusakan. Pemerintah Kabupaten Bantul, berusaha meminimal-kan hal itu dengan melibatkan tim independen berasal dari perguruan tinggi antara lain UPN "Veteran" Yogyakarta. Realitanya hasil verifikasi

masih terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah dan menimbulkan berbagai konflik. Namun penanganan terhadap konflik komunikasi sosial tersebut belum optimal dan menyeluruh. Ada wilayah yang cepat mengatasi konflik namun ada juga yang lamban bahkan terkesan dibiarkan saja dan diselesaikan oleh waktu.

Konflik yang berkepanjangan dirasakan dan diamati oleh banyak kalangan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, dan Perguruan tinggi bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta dan tidak mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Secara psikologis, konflik komunikasi yang berkepanjangan juga dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Walaupun konflik masih muncul dalam masyarakat, pemulihan DIY pasca gempa sangat cepat. Salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengedepankan budaya lokal dalam menangani konflik-konflik tersebut. Cara ini terus dilakukan sampai saat ini melalui beberapa forum pertemuan informal yang ada di masyarakat seperti arisan, pengajian, pertemuan *selapanan*, dan lainnya. Berdasarkan latarbelakang tersebut penulis tertarik meneliti: bagaimana manajemen konflik berbasis budaya lokal sebagai upaya meningkatkan jati diri Bangsa Indonesia di kalangan masyarakat korban Gempa 2006 di Bantul DI.Yogyakarta.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Konflik dan Sumber Konflik

Dalam kehidupan sosial, konflik merupakan suatu bagian alami yang tidak dapat dihindari. Pada hakikatnya konflik adalah segala macam interaksi pertentangan diantara dua pihak atau lebih. Wexley dan Yukl (1988:229) mendefinisikan konflik sebagai suatu perselisihan atau perjuangan

di antara dua pihak yang ditandai dengan menunjukkan permusuhan dan/ atau menggaggu dengan sengaja pencapaian tujuan pihak-pihak yang menjadi lawannya. Sejalan dengan itu, menurut Winardi (1994:1), konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antar orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi.

Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa, konflik merupakan proses pertentangan sekurang-kurangnya dua pihak dalam suatu organisasi, prosesnya dimulai jika satu pihak merasa bahwa pihak lain menentang atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya. Sejalan dengan itu Robbins, (1984:142) menjelaskan kesamaan dari kebanyakan definisi konflik: *The assumption that there are two or more parties whose interest or goals appear to be incompatible, the parties are therefore in apposition. When one party block the goal achievement of another state exists.*

Umumnya yang menjadi sumber ketidakcocokan atau pertentangan tersebut, menurut Wexley dan Yukl (1988:321) meliputi: (1) persaingan terhadap sumber-sumber, (2) ketergantungan pekerjaan, (3) kekaburan bidang tugas, (4) problem status, (5) rintangan komunikasi, dan (6) sifat-sifat individu. Sedangkan menurut Handoko (1997:349) terdapat lima jenis konflik dalam kehidupan sosial, yaitu:

- 1) *Konflik dalam diri individu*, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidak pastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.
- 2) *Konflik antar individu*, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan.

- 3) *Konflik antara individu dan kelompok*, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.
- 4) *Konflik antar kelompok*, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
- 5) *Konflik antar masyarakat*, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien.

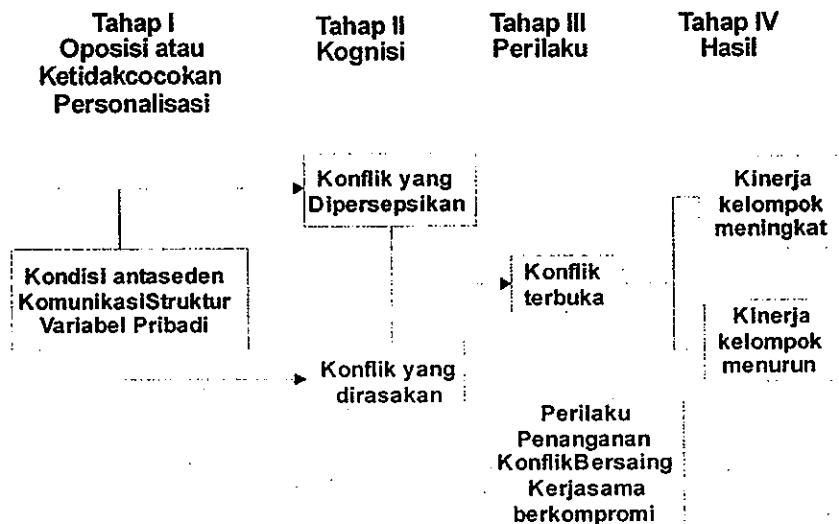
Konflik dalam penelitian ini dapat berupa konflik dalam diri individu (misalnya tekanan batin/perasaan karena kehilangan harta benda), konflik antar individu (misalnya antar tetangga berebut bantuan), konflik individu dengan kelompok (misalnya warga

yang menuntut LSM agar bertindak adil), konflik antar kelompok (misalnya LSM dengan pemerintah), dan konflik antar masyarakat terkait dengan perebutan sumberdaya yang sangat terbatas.

## 2.2. Tahapan Konflik

Robbins (1984:145) menggambarkan dengan jelas proses konflik yang terdiri atas empat tahapan, yaitu: tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial, tahap kognisi dan personalisasi, tahap-tahap perilaku, dan tahap hasil. Hal ini dapat dilihat pada *Gambar 1*. Mengenai manajemen untuk mengurangi dan mengatasi konflik, terdapat beberapa cara, antara lain, memperbanyak informasi, kontak, dan perundingan, serta mempersatukan pihak-pihak yang berkonflik dengan menghadapi ancaman bersama (Winardi, 1984: 83-89).

Mengenai metode-metode untuk menyelesaikan konflik, Winardi (1994:84) berpendapat bahwa cara-cara untuk menyelesaikan konflik bisa menggunakan manajemen dominasi atau supremasi,



Gambar 1 : Tahapan Konflik  
Sumber: Robbins (1984; 145)

kompromis, atau pemecahan problem integratif. Manajemen konflik dominasi menggunakan cara-cara pemecahan konflik yang bersifat memaksa (*forcing*), membujuk (*smoothing*), menghindari (*avoidance*), dan keinginan mayoritas (*majority Rule*). Menurut hasil penelitian Lestari (2002:58), model penyelesaian konflik secara kompromi atau mengambil jalan tengah banyak dilakukan, karena dianggap bisa menguntungkan ke dua belah pihak yang berkonflik.

Hasil penelitian Wiwiek Awiati (dalam Hadi, 2006:19), juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dengan pendekatan *in-terest* (perundingan antar pihak yang berkonflik) telah mampu mengembangkan kesepakatan atas dasar kepentingan bersama. Sementara, menurut Pruitt (2004:315) problem solving merupakan strategi pemecahan konflik yang menghasilkan kompromi, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang,

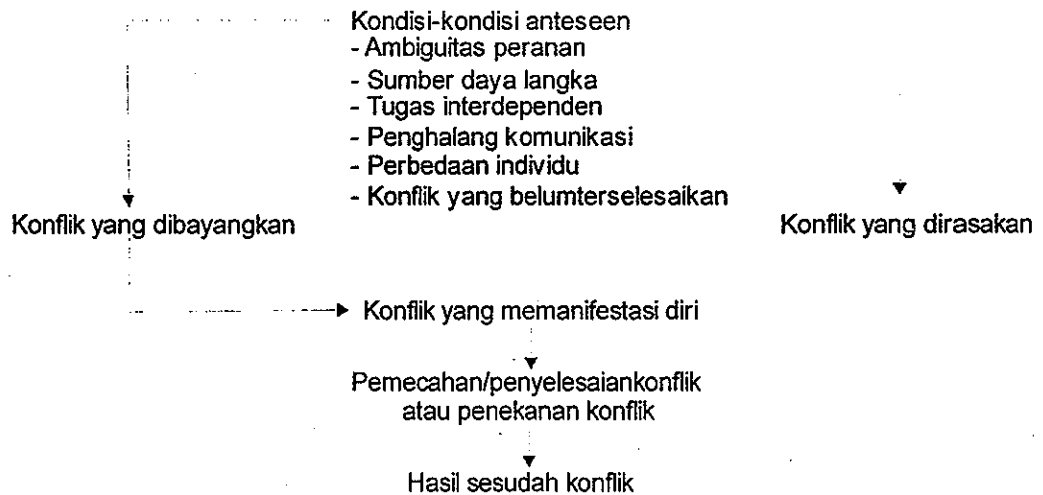
atau solusi integratif.

### 2.3. Lima Gaya Manajemen Konflik

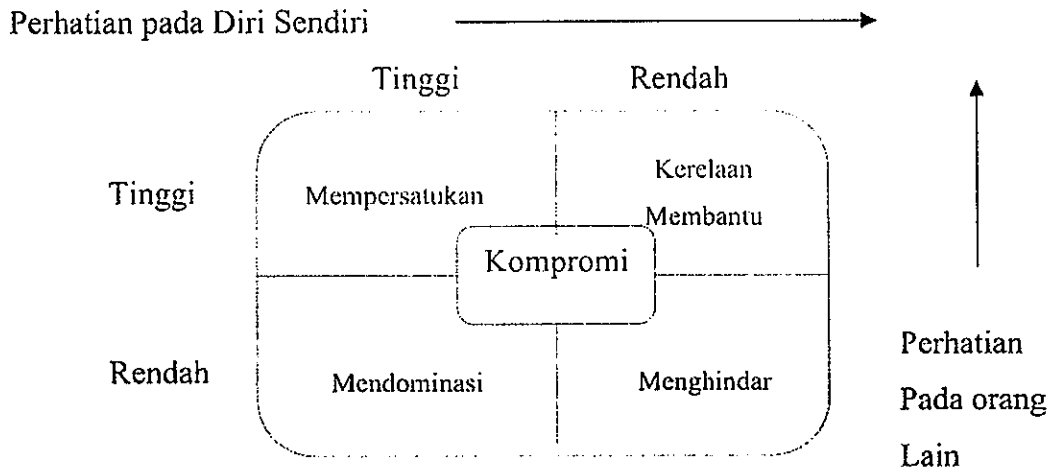
Penelitian ini mengidentifikasi jenis-jenis konflik, sumber konflik, serta dampak konflik komunikasi bencana. Langkah berikutnya adalah mengetahui strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik. Di sini ada lima pendekatan penting untuk mengidentifikasi strategi konflik. Berikut model yang diadopsi untuk mengidentifikasi konflik dan manajemen konflik bencana.

**Gambar 3** melukiskan lima gaya konflik. Seorang individu atau sekelompok masyarakat dapat memilih salah satu gaya yang paling sesuai untuk menyelesaikan konflik. Gaya penyelesaian konflik dengan mempersatukan (*integrating*), adalah salah-satu gaya konflik yang menggunakan tukar-menukar informasi. Di sini ada keinginan

Ada cara lain untuk menganalisis konflik, yaitu tahapan sebagai berikut (Winardi, 1994: 14)



Gambar 2: Tahapan Konflik  
Sumber : Winardi (1994; 14)



**Gambar 3 : Lima Gaya Manajemen Konflik**

(Sumber: Meyers dalam Hendricks,2008:47).

untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Gaya penyelesaian konflik jenis ini efektif bila isu konflik adalah kompleks.

Penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan (*integrating*) mendorong tumbuhnya *creative thinking* (berpikir kreatif). Mengembangkan alternatif adalah salah satu kekuatan dari gaya *integrating*. Penyelesaian konflik dengan model mempersatukan menekankan diri sendiri dan orang lain dalam mensintesis informasi dari perspektif yang divergen (berbeda). Namun demikian, penyelesaian konflik gaya ini menjadi tidak efektif bila kelompok yang berselisih itu kurang memiliki komitmen atau bila waktu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena penyelesaian konflik dengan cara mempersatukan itu membutuhkan waktu yang panjang.

Gaya penyelesaian konflik dengan kerelaan untuk membantu (*obliging*), adalah gaya penyelesaian konflik yang membantu menempatkan nilai yang tinggi untuk orang lain sementara dirinya sendiri dinilai rendah. Gaya ini mungkin mencerminkan rendahnya

penghargaan terhadap diri sendiri oleh individu yang bersangkutan.

Strategi rela membantu berperan dalam menyempitkan perbedaan antarkelompok dan mendorong mereka untuk mencari kesamaan dasar. Perhatian tinggi kepada orang lain menyebabkan seorang individu merasa puas dan merasa keinginannya terpenuhi oleh pihak lain, kadang-kadang mengorbankan sesuatu yang penting untuk dirinya sendiri. Gaya penyelesaian "rela membantu orang lain", bila digunakan secara efektif, dapat mengawetkan dan melanggengkan hubungan. Gaya ini sesuai dengan nilai budaya lokal (Jawa) bahwa *ngalah durung mesthi kalah* (mengalah belum tentu kalah).

Gaya penyelesaian konflik dengan mendominasi (*dominating*), adalah lawan dari gaya *obliging*. Gaya ini tekanannya pada diri sendiri. Dimana kewajiban bisa diabaikan oleh keinginan pribadi, gaya mendominasi ini meremehkan kepentingan orang lain. Gaya ini adalah strategi yang efektif bila suatu putusan yang cepat dibutuhkan atau jika persoalan tersebut kurang penting.



Strategi penyelesaian konflik dengan "gaya mendominasi" paling baik dipakai bila dalam keadaan terpaksa. Dipergunakan sepanjang anda merasa memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani anda.

Gaya penyelesaian konflik dengan menghindari (*avoiding*) adalah gaya penyelesaian konflik keempat. Para penghindar tidak menempatkan suatu nilai pada diri sendiri atau orang lain. Gaya ini adalah "gaya menghindari dari persoalan". Aspek negatif gaya menghindari termasuk diantaranya "menghindar dari tanggung jawab" atau mengelak dari suatu isu. Seorang yang menggunakan gaya ini akan lari dari peristiwa yang dihadapi.

Gaya penyelesaian konflik dengan kompromi (*compromising*), ditempatkan di tengah. Dalam gaya ini perlu diperhatikan pada diri sendiri maupun pada orang lain berada dalam tingkat sedang. Ini adalah orientasi jalan tengah. Dalam kompromi, setiap orang memiliki sesuatu untuk diberikan dan menerima sesuatu. Kompromi adalah paling efektif sebagai alat bila isu itu kompleks atau bila ada keseimbangan kekuatan. Kompromi dapat menjadi pilihan bila metode lain gagal dan dua kelompok mencari penyelesaian jalan tengah. Kompromi bisa menjadi pemecah perbedaan atau pertukaran konsesi. Kompromi hampir selalu dijadikan sarana oleh semua kelompok yang berselisih untuk memberikan sesuatu untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahannya.

#### **2.4. Budaya Lokal sebagai Sarana Manajemen Konflik dan Membentuk Jati diri Bangsa**

Menurut Rosyid (2007) jati diri suatu bangsa adalah sebuah "proses menjadi" terus menerus yang dibayangkan bersama secara sadar oleh anggota bangsa tersebut. Artinya, jati diri bangsa, dan "bentuk negara RI" adalah sebuah "proyek konsensus bersama", sebuah "proses penemuan", sebuah proses

"memaknai kebersamaan sekelompok suku dalam suatu kawasan" dalam rangka memenangkan kompetisi budaya dunia. Ini berarti bahwa jati diri bangsa merupakan sebuah proses kreatif bangsa tersebut untuk mempertahankan diri sebagai sebuah bangsa dalam sebuah pertarungan dan penaklukan budaya di dunia. Proses kreatif bangsa adalah upaya bangsa tersebut untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus, keberanian meninggalkan aspek-aspek negatif budaya sendiri, dan mengambil aspek-aspek positif budaya *main stream*, serta mengambil keputusan atas postur budaya mereka sendiri dengan penuh tanggungjawab. Upaya mempertahankan jati diri ini adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggungjawab. Kewenangan kreatif ini dipijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu : 1)Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk "pasar" yang dilayaninya, 2) Kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, 3) Kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus, 4) Kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, 5) Kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, 6) Keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggungjawab, 7) Ketrampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk.

Masyarakat korban gempa di Bantul Yogyakarta memiliki kapasitas kreatif yang memadai dan mampu membangun jati dirinya sendiri. Sebagai warga negara mereka sanggup secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan pasca gempa 2006. Mengembangkan kapasitas kreatif dalam rangka membangun jati diri bangsa harus dipijakkan pada upaya

menjadikan masyarakat untuk dapat mengatasi konflik atau persoalan hidup secara bijaksana berdasarkan kearifan lokal.

Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).

Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah, dan di Jawa berupa *parikan*, *paribasan*, *bebasan*, *saloka*. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan pada kearifan lokal dalam bentuk aslinya, tetapi juga pada upaya masyarakat dalam melakukan rekacipta kearifan lokal baru (*institutional development*), yaitu "memperbaharui institusi-institusi lama yang pernah berfungsi baik" dan dalam upaya membangun tradisi, yaitu "membangun seperangkat institusi adat-istiadat yang pernah berfungsi dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu pada suatu masa tertentu, yang terus-menerus direvisi dan direkacipta ulang sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat.

Secara mendasar, suatu budaya memiliki tata nilai menyangkut hal-hal yang sakral dan yang profan (ranah religio-spiritual), kebenaran dan ketidakbenaran (ranah logika dan ilmu pengetahuan), kebaikan dan keburukan atau kejahatan (ranah etika), keindahan dan ketidakindahan (ranah estetika), dan kepatutan atau kesopanan dan ketidakpatutan atau ketidaksopanan (ranah etiket). Dalam tata nilai budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni: (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9) nilai kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan

kawasan cagar budaya, (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan (<http://Primantoro>, diakses 27 September 2009).

Lebih lanjut Primantoro mengatakan bahwa sistem nilai kebudayaan tertentu, di satu pihak senantiasa diyakini terdapat ideal-ideal yang harus dikiblati, namun di lain pihak selalu terjadi distorsi-distorsi, bahkan penyimpangan-penyimpangan dalam praktek kehidupan. Meskipun harus diakui bahwa dalam perilaku kongkrit masyarakat Yogyakarta boleh jadi terjadi distorsi dan penyelewengan atas nilai-nilai yang diidealkan (*adiluhung*), namun dalam naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini tetap dirumuskan ideal-ideal yang diyakini sebagai kiblat dalam meraih keutamaan, karena pada hakikatnya manusia itu bukan hanya "produk" kebudayaan belaka, melainkan juga sekaligus "pencipta" kebudayaan. Tata nilai budaya Yogyakarta ialah tata nilai Budaya Jawa yang memiliki kekhasan dalam semangat pengaktualisasian nilai-nilai kejawaan pada umumnya. Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan sistem nilai yang dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), inspirasi, dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta.

Menurut Primantoro bahwa masyarakat harus menyadari pula bahwa rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini, sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksklusifisme kesukuan atau kedaerahan, melainkan sebagai bentuk pengukuhan jati diri budaya keyogyakartaan sebagai bagian integral dari kebhinekatunggalikaan kebudayaan nasional dan menjadi salah satu bagian dari keberagaman kebudayaan internasional (<http://primantoro.web.id/?p=105> diakses tanggal 27 September 2009). Berikut kutipan

beberapa (6 dari 14) tata nilai budaya Yogyakarta, yaitu: Tata Nilai Religio-Spiritual, Tata Nilai Moral, Tata Nilai Kemasyarakatan, Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan, Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan, serta Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan.

### 1) Tata Nilai Religio-Spiritual

Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*milih mula mulanira*). Tuhan ialah asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu (*sangkan paraning dumadi*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makrokosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikrokosmos*), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsiring kanyatan, mobah mosiking kahanan*), bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal pun pula tiada berakhir. Tuhan adalah dzat yang meliputi segala sesuatu, tetapi tidak dapat diindera dengan cara apa pun (*adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa sénggolan*). Meskipun demikian, Tuhan senantiasa menyertai dan mengawasi dunia ini sehingga tiada satu peristiwa sekecil apa pun yang terjadi di luar penglihatan Tuhan (*Pangeran iku ora saré*).

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang-jenjang derajatnya. Namun demikian semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan

seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati oleh Tuhan, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Disharmoni pada mikrokosmos akan mempengaruhi harmoni makrokosmos, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, manusia sebagai mikrokosmos yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa, wajib menjaga harmoni alam semesta ini dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme, melainkan harus dengan rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*) bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*).

Dunia yang benar, baik, indah, selamat, dan lestari itu tampak menggejala dalam kehidupan yang serba tertib dan teratur (*tata*), semua kegiatan kehidupan dilaksanakan dengan cermat dan saksama (*titi*), sehingga membuahkan ketenteraman (*tentrem*), kemakmuran dan kesejahteraan (*karta raharja*). Dalam kehidupan nyata seringkali terjadi peperangan antara keteraturan dan kekacauan. Manusia wajib menegakkan keteraturan dengan menghapus kekacauan (*memasuh malaning bumi*). Semua itu bisa terlaksana apabila manusia berusaha keras mengerahkan akalbudi dan segenap kemampuannya untuk mewujudkannya (*rahayuning bawana kapurba waskithaning manungsa*). Itulah darma bakti yang harus dilaksanakan oleh manusia kepada Tuhan, sebagai makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya.

Dalam usaha menapaki kehidupan, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkannya memiliki keterbatasan. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus ikhlas (*lila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya. Kematian, jodoh, anugerah, garis nasib, dan rejeki bagi tiap-tiap orang merupakan kepastian yang telah ditentukan oleh Tuhan (*siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat kodrat, lima bandha*). Manusia sekadar menjalani hidup ini (*manungsa saderna nglakoni, kaya wayang upamané*) sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Akan tetapi, nilai-nilai seperti itu bukan berarti mengajak manusia untuk pasrah total tanpa usaha dalam hidup (*fatalistik*), melainkan dimaksudkan sebagai kerendahhatian agar hendaknya manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja (*rumangsa bisa*), namun harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya (*bisa rumangsa; ngrumangsani*), jangan mendikte kehendak Tuhan (*aja nggégé mangsa*), dan pandai-pandailah bersyukur (*narima ing pandum*).

Dalam batas kewajaran manusia harus tetap berusaha (*mbudidaya*) meningkatkan taraf harkat dan martabat kehidupannya, di antaranya dengan mengusahakan dan terus-menerus meningkatkan kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu (*wiryu, arta, tri winasis*) yang dimilikinya. Dengan memiliki dan meningkatkan ketiga hal itu, diharapkan kehidupannya menjadi lebih benar, lebih baik, lebih indah, dan lebih bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang yang sejahtera, berbahagia, dan berpengaruh secara luas karena memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat (*mukti wibawa mbaudhendha*). Meskipun mencari harta dan kedudukan lahiriah memang dianjurkan, namun dimensi batiniah tetap lebih diutamakan (*sugih tanpa bandha*).

Pada dasarnya tidak seorang pun mengetahui dengan pasti garis hidupnya. Oleh karena itu, upaya keras mengubah nasib masih tetap terbuka lebar dengan cara lebih tekun berusaha dan lebih khusuk berdoa (*nang donya kang sugih puji, yèn sira temen satuhu, tuhu teka dennyu muja*), sebab apa yang tampaknya seakan-akan telah digariskan sesungguhnya masih dapat diubah dengan doa dan ikhtiar kerja keras secara tepat (*kodrat bisa diwiradaf*). Dengan demikian, sebaik-baik sikap hidup ialah merampungkan segala urusan keikhhtiaran sampai derajat tertinggi menurut kemampuan manusiawinya (*mupus*), kemudian menunggu keputusan Tuhan dengan pengharapan yang baik.

Agar dalam hidupnya manusia banyak mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan dijauhkan dari malapetaka (*rahayu ingkang sami pinanggih, widada nir ing sambikala*), maka manusia harus senantiasa mendekati diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan benar hendaklah dimulai dengan membersihkan diri dari perbuatan tercela lima M (*ma-lima*), yakni membunuh (*mateni*), mencuri (*maling*), berjudi (*main*), berzina (*madon*), menghisap candu atau narkoba jenis apa pun dan meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan lupa diri (*madat; mendem; mabuk*). Di samping itu, agar proses mendekati diri kepada Tuhan berhasil dengan baik, manusia harus mengurangi kenikmatan duniawi dan senantiasa waspada terhadap godaan nafsu duniawi yang menggiurkan (*cegah dhahar lawan guling, kaprayitnan dèn kaesthi*), mengontrol dan membimbing nafsunya dari yang paling rendah menuju derajat tertinggi (*lauwamah – amarah – supiyah – muthmainah*). Berkomunikasi secara spiritual dengan Tuhan itu bertahap-tahap dan berjenjang-jenjang, dari bentuk-bentuk yang paling lahiriah sampai yang paling batiniah (*saréngat – tarékat –*

*hakékat – makripat; sembah raga – sembah cipta – sembah jiwa – sembah rasa*). Manusia harus mengerti sampai di mana jenjang kedekatan dirinya dengan Tuhan dan harus senantiasa berusaha keras agar semakin dekat dengan Tuhan menurut keyakinannya.

Dalam berkomunikasi spiritual dengan Tuhan, setiap orang memiliki kebebasan penuh beribadah menurut tata cara kepercayaan-keagamaan yang diyakininya. Tidak seorang pun berhak untuk memaksakan kepercayaan-keagamaannya kepada siapa pun dan dengan cara apa pun dan memaksakan tata cara peribadatan apa pun yang diyakininya kepada siapa pun. Demikian pula tidak seorang pun berhak melarang atau menghalang-halangi seseorang atau sekelompok orang untuk berkomunikasi dengan Tuhan menurut kepercayaan-keagamaan dan tata cara peribadatan yang diyakininya, karena kepercayaan/keagamaan merupakan hak azasi manusia yang secara kodrati melekat pada tiap-tiap orang. Perbedaan keyakinan merupakan kewajaran yang harus dihormati oleh setiap orang. Orang harus toleran dan menjaga perasaan orang lain (*amemangun karyénak tyasing sasama*) dalam keberbedaan keyakinan satu sama lain. Tidak seorang pun layak merasa paling benar ketakwaannya kepada Tuhan (*ora golèk beneré dhéwé*) karena peribadatan yang dijalankannya, sebab derajat ketakwaan seseorang lebih dinilai dari perilaku kongkritnya dalam kehidupan sehari-hari.

## 2) Tata Nilai Moral

Menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia harus dimulai dari diri manusia sendiri dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan, kebaikan perilaku, keharmonisan dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan terutama dengan Tuhan. Kebenaran pemikiran dan ucapan membuahkan

kejujuran, dan kejujuran membuahkan kebaikan. Terdapat kepastian yang tak terelakkan bahwa barang siapa berbuat baik dengan benar, niscaya dia akan tegak dan barang siapa berbuat salah dengan cara apa pun, pasti dia akan runtuh (*wong bener jejer, wong salah sèlèh*), tidak peduli apakah dia seseorang yang berdarah biru (*trahing kusuma rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih*) atau berharta dan berkedudukan sosial tinggi (*bèr bandha bèr bandhu, kajèn kèringan*), ataukah orang kecil (*wong cilik*) dengan status sosial rendah (*wong pidak pejarakan*). Sesungguhnya, harkat dan martabat seseorang lebih ditentukan oleh kata dan perbuatannya (*ajining dhiri saka lathi lan pakarti*). Barang siapa berbuat baik tampaklah kebajikannya, barang siapa berbuat kejahatan akan ketahuan pula keburukannya, dan barang siapa berbuat kejahatan niscaya akan akan sirna keberuntungan dan keberkatannya, dan dijauhkan dari kasih sayang dan anugerah Tuhan (*becik ketitik ala ketara, sapa kang agawé ala bakal sirna wahyuné*). Sehebat apa pun kekuatan keangkaramurkaan akan dapat ditundukkan oleh kebajikan (*sura sudira jayaning kang rat, swuh brastha tekaping ulah damastuti*).

Dunia ini berputar dan berubah, begitu pula dengan nasib manusia juga berubah-ubah, berputar, berganti (*cakramanggilingan*). Oleh karena itu manusia jangan mudah takjub dengan kesementaraan perubahan yang memukau (*aja gumunan, aja kagetan*), dan jangan pula menyombongkan diri dan meremehkan orang lain dikala dirinya berjaya sementara orang lain sedang sengsara (*aja dumeh*). Boleh jadi suatu saat nanti status sosial seseorang atau keturunan orang yang status sosialnya tinggi menjadi sengsara, sementara orang kecil atau keturunan orang yang berstatus sosial rendah malahan bisa berjaya (*tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati*). Manusia harus berhati-hati dalam bertindak, jangan sampai melukai dan atau

merugikan pihak lain. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya (*ngundhuh wohing pakarti*). Perbuatan baik akan berbuah kebajikan, perbuatan buruk akan berbuah keburukan (*sapa kang nandur bakal ngundhuh, sapa kang gawé bakal nganggo, sapa kang utang bakal nyaur*).

Watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perangai buruk seperti angkuh, bengis, jahil, serakah, panjang tangan, gila pujian (*aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman*). Jangan menyombongkan kepandaian, harta, paras elok, dan busana (*aja sira ngegungaken akal, bagus iku dudu mas picis, lawan dudu sandhangan*). Jangan pula menyombongkan diri dengan keberanian, suka menantang untuk bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki, dan suka mencela orang lain (*aja watak sira sugih wani, aja sok ngajak tukaran, aja anguthuh, aja ewanan lan aja jail, poma sira aja drengki, dahwen marang ing sasama*). Dalam hidup hendaklah orang jangan menyombongkan diri dengan berlebih-lebihan membanggakan kekuatan baik fisik, harta, maupun kekuasaannya, keagungan keturunan atau kebesaran derajat sosialnya, dan kepandaiannya (*aja adigang, adigung, adiguna*).

Semua watak buruk itu harus dihindari, dijauhi, dan ditinggalkan. Orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan (*nandur kabecikan, ndhedher kautaman*). Orang yang baik selalu berusaha menyenangkan hati orang lain (*amemangun karyénak tyasing sesama*), seperti mengemukakan pendirian secara lembut (*pambegané alus; landhep tanpa natoní*), berhati-hati dalam berbicara (*yèn angucap ngarah-arrah*), tingkah dan tutur katanya bersahaja (*tingkah una-niné prasaja*), setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu karena dilandasi nurani yang bersih (*saujaré manis trus ati*), bertenggang rasa dan berbelas kasih kepada

semua makhluk hidup (*kéh tepané mring sagunging urip*). Pendek kata, semua makhluk ingin dibahagiakannya (*sama dèn arah raharjané*).

### 3) Tata Nilai Kemasyarakatan

Masyarakat (*bebrayan agung*) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang besar. Landasan utama suatu keluarga ialah kasih sayang (*sih kinasihan; asih ing sesami*) di antara para anggotanya. Hidup bermasyarakat haruslah dilandasi oleh kasih sayang dengan mewujudkan dan senantiasa menjaga kerukunan. Kerukunan merupakan tiang utama kehidupan kemasyarakatan, karena kerukunan memberikan kekuatan, sedangkan pertikaian mendatangkan kehancuran (*rukun agawé santosa, crah agawé bubrah*). Apabila timbul persoalan di antara anggota masyarakat, maka harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (*ana rembug ya dirembug*), karena masyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga besar.

Seandainya terjadi percikan konflik tidak perlu dibesar-besarkan (*kriwikan dadi grojogan*), karena dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam pertikaian sehingga semakin mengeruhkan permasalahan yang timbul. Suatu perselisihan lebih baik dihadapi dan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati (*nglurug tanpa bala*). Dan, apabila seseorang merasa benar dan memperoleh kemenangan atas suatu penyelesaian perselisihan, janganlah pihak yang menang itu merendahkan atau menghinakan pihak yang kalah (*menang tanpa ngasoraké*). Bagaimanapun juga, yang kalah itu tetaplah manusia yang harus dijaga harga dirinya, dijaga martabatnya. Pendek kata, siapapun dia dan bagaimanapun posisinya, setiap orang harus tetap dimanusiakan (*diuwongké*). Dalam hidup bersama, di antara anggota masyarakat hendaklah saling berbagi ilmu dan pengalaman (*asah*) agar semakin cerdas

mengelola kehidupan, saling mengasahi (*asih*) agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing (*asuh*) agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Sesungguhnya keselamatan dan kesejahteraan manusia itu dapat terwujud bilamana nilai-nilai kemanusiaan senantiasa terjaga (*rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané*).

Hidup bersama dalam masyarakat dituntut adanya solidaritas atau kesetiakawanan sosial antaranggota masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah (*sabaya mati, sabaya mukti*). Satu sama lain harus tolong-menolong, bantu-membantu, sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat dihadapi dan diselesaikan secara lebih ringan dan memadai. Terlebih lagi, dalam menangani urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, antaranggota masyarakat hendaknya seia-sekata, bekerja sama, bergotong-royong bahu-membahu (*saiyek saéka kapti*) merampungkan urusan bersama dengan sebaik-baiknya. Bahkan, demi kepentingan umum, orang janganlah berhitung-hitung akan imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya (*sepi ing pamrih, ramé ing gawé*) karena bekerja demi kepentingan umum itu merupakan wujud keutamaan tugas yang harus diemban manusia sebagai makhluk Tuhan dalam rangka berperindah dan menjaga kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*), agar dunia senantiasa dapat memberi perasaan aman dan damai (*ayom ayem*) bagi penghuninya.

Untuk menjaga kohesi dan harmoni kehidupan sosial, hubungan antaranggota masyarakat dilandasi oleh prinsip hormat. Penghormatan ini pertama-tama diberikan kepada kedua orang tua (*ingkang dingin rama ibu*), mertua lelaki dan perempuan (*kaping kalih maratuwa lanang wadon*), saudara tua (*kaping katri marang sadulur tuwa*), guru (*kaping paté mring guru sayekti*), kepada pemimpin atau atasan (*kaping lima*

*marang gustinira*). Secara umum, yang muda harus menghormati yang tua atau yang dituakan. Sebaliknya, yang tua atau yang dituakan wajib menghargai, melindungi, membimbing, dan menyayangi yang muda. Prinsip hormat ini dijalankan agar tiap orang bersedia memanusiaikan orang lain dan dari lain pihak dirinya juga merasa dimanusiaikan oleh orang lain (*nguwongké lan diuwongké*). Pararel dengan prinsip memanusiaikan orang itu ialah prinsip empati dan timbal-balik (*tepa salira*), suatu prinsip yang menempatkan diri sendiri pada diri orang lain sehingga orang akan berhati-hati dan bertindak adil kepada orang lain karena dalam diri orang lain itu bersemayam pula dirinya yang akan ikut merasakan akibat tindakannya. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terasing dan senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari orang lain dalam masyarakatnya.

Prinsip hormat yang lebih bersifat batiniah itu diekspresikan secara lahiriah dalam wujud sopan santun (*tata karma; unggah-ungguh*). Sopan santun itu menjauhkan orang dari celaan (*tata krama iku ngadohaké ing panyendhu*). Dalam pergaulan orang harus pandai mengemas dirinya dengan bahasa, busana, dan gerak-gerik anggota tubuh secara santun dan sedapat mungkin menyenangkan hati orang di sekitarnya. Agar dapat membawa diri dengan tepat dalam pergaulan, orang harus pula dengan cermat menyesuaikan ketiga kemasan tadi dengan waktu, tempat, dan konteks. (*angon mangsa, empan papan, duga prayoga*). Dasar terdalam dari semua itu ialah sikap batin yang harus dijaga bahwa menghormat itu bukanlah wujud kerendahdirian melainkan wujud kerendahaan.

#### 4) Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan

Dalam hidup bersama, sekumpulan manusia membutuhkan pemimpin. Seorang

pemimpin dituntut memiliki kelebihan dibanding yang dipimpin baik dalam hal pengetahuan, keberanian, maupun kearifan. Seorang pemimpin harus berani tampil di depan memberi teladan bagi yang dipimpin (*ing ngarsa sung tuladha*), seorang pemimpin harus mampu menggugah semangat atau memotivasi yang dipimpin (*ing madya mangun karsa*) agar lebih giat dalam perjuangan hidup, dan memberi dorongan, kekuatan, dan perlindungan (*ing wuntat tut wuri handayani*) agar yang dipimpin kian percaya diri dan senantiasa memperoleh kemajuan dalam menapaki kehidupan.

Dalam pemerintahan, seorang pemimpin harus merangkul, mengasihi, dan melindungi segenap rakyat (*hamengku*) tanpa membeda-bedakan etnis, suku, ras, golongan, dan agama yang dipeluknya, agar seluruh rakyat merasa tenteram dan damai (*ayom ayem*). Pemimpin harus berusaha keras agar rakyat dapat menikmati kehidupan yang layak (*hamangku*), oleh karenanya seorang pemimpin harus berwatak murah hati dan menepati janji (*bèr budi bawa laksana*). Bermurah hati artinya seorang pemimpin ibaratnya harus siap memberi pakaian kepada rakyat yang tak punya pakaian (*paring sandhang wong kawudan*), memberi makan kepada rakyat yang kelaparan (*paring pangan wong kaluwèn*), memberi air kepada rakyat yang kehausan (*paring banyu wong kasatan*), memberi tongkat kepada rakyat yang menapaki jalan licin (*paring teken wong kalunyon*), memberi peneduh kepada rakyat yang kepanasan (*paring kudhung wong kepanasan*), dan memberi payung kepada rakyat yang kehujan (*paring payung wong kodanan*). Menepati janji artinya tidak ingkar dan konsekuen atas perkataannya, sebab ucapan seorang pemimpin harus dapat dipegang, tidak boleh asal bicara dan plinplan (*sabda pandhita ratu sepisan dadi dhatan kena wola-wali, pindhia nila kresna tumetes ing dalancang seta*). Dalam situasi yang sulit, pemimpin harus mengambil tanggung jawab

terdepan dalam menyelesaikan permasalahan (*hamengkoni*) agar rakyat terbebas dari kesulitan dan kesengsaraan; dan rakyat merasa terlindungi oleh pemimpinnya.

##### 5) Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan

Yogyakarta merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam sejarah Republik Indonesia. ... Ketika Jakarta kurang aman, ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta atas saran Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di Yogyakarta eksistensi Negara Republik Indonesia yang masih muda itu dipertaruhkan dan dengan mati-matian dipertahankan. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII, para birokrat, para diplomat, para pejuang bersenjata, dan seluruh rakyat Yogyakarta bahu-membahu menegakkan Republik Indonesia dengan pengorbanan pikiran, tenaga, harta benda, bahkan nyawa. Semua itu dipersembahkan tanpa pamrih (*sepi ing pamrih*) demi tegaknya eksistensi Negara Republik Indonesia. Semangat berani dan rela berkorban, kesetiakawanan sosial (solidaritas; *sabaya pati, sabaya mukti*), persatuan dan kekompakan (*saiyek saéka praya*) baik antarpemimpin, antarakawula, maupun antara rakyat dan pemimpin (*manunggaling kawula gusti*), jiwa tanpa pamrih, cinta tanah air (patriotisme), rasa kebangsaan (nasionalisme), dan kegigihan menjaga martabat bangsa dan negara (*sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira*) merupakan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi masyarakat Yogyakarta.

Partisipasi warga Yogyakarta dalam memperjuangkan dan dengan gigih mempertahankan tegaknya kemerdekaan dan eksistensi negara Republik Indonesia itu dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam diri tiap-tiap warga tertanam perasaan memiliki negara ini (*duwé rasa handarbèni*),



sehingga apabila terjadi sesuatu yang dapat mengancam, merusak, atau bahkan merobohkan kedaulatan negara, warga Yogyakarta siap berjuang sampai titik darah yang penghabisan (*wani mèlu hangrungkebi*). Setiap warga Yogyakarta senantiasa mawas diri dan berusaha keras memberi kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (*mulat salira hangrasa wani*).

#### 6) Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan

Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) sebagaimana diuraikan di atas, dan dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*), masyarakat Yogyakarta memiliki nilai-nilai khas sebagai penciri khusus keyogyakartaan dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur itu.

Dalam mengaktualisasikan nilai-nilai adiluhung tersebut, masyarakat Yogyakarta selalu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*), sehingga seluruh sumber daya itu dapat terkonsentrasi (*sawiji*) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan. Semua langkah itu harus diayunkan dengan senantiasa disertai semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*). Dengan segala potensi yang dimilikinya, Masyarakat Yogyakarta senantiasa percaya diri dalam bertindak (*sengguh*), tidak akan mundur setapak pun (konsisten) dan siap menanggung segala risiko apa pun (konsekuen) yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab (*lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani*) demi terwujudnya cita-cita

yang diidam-idamkannya.

Tata nilai tersebut dapat digunakan untuk menganalisis berbagai manajemen konflik di kalangan korban bencana gempa 27 Mei 2006 di Bantul Yogyakarta.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Pajangan dan Banguntapan Bantul DIY, menggunakan pendekatan subjektif dengan data kualitatif. Metode pengumpulan data : observasi di lokasi bencana, wawancara mendalam yaitu : organisasi kemasyarakatan, yayasan, atau perusahaan, informan dari aparat pemerintah terkait, dokumentasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) diambil dari informan hasil wawancara mendalam yang dapat mewakili kelompoknya.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persoalan yang muncul pasca gempa bumi bisa dirunut dalam tiga fase penanganan bencana yaitu fase tanggap darurat, fase *recovery* dan fase rekonstruksi. Pada masing-masing fase tersebut muncul konflik dalam masyarakat dengan dampak yang berbeda-beda. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat pasca gempa adalah dengan mengedepankan budaya lokal masyarakat. Penggunaan budaya lokal ini juga akan tetap memperkokoh jati diri bangsa.

Gempa bumi yang terjadi di DIY yang terjadi pada bulan Mei 2006 dengan kekuatan 5.9 skala richter merupakan peristiwa yang tidak disangka oleh masyarakat DIY. Gempa di wilayah ini juga diwarnai dengan isu tsunami yang menimbulkan kepanikan luar biasa, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami gempa terparah.

Bisa dikatakan gempa yang melanda DIY dengan wilayah terparah adalah Kabupaten Bantul yang menimbulkan dampak luar biasa. Beban berat mendadak telah menyebabkan kepanikan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini

memunculkan "manajemen panik". Manajemen panik dilakukan untuk mengatasi masalah dan sumberdaya yang terbatas, sementara harapan korban begitu besar untuk segera mengatasinya sehingga tidak jarang muncul ketegangan akibat adanya kebutuhan dan persediaan. Adanya kesimpangsiuran, ketidakpastian informasi karena komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang belum lancar. (Diolah dari laporan Bappeda, Bantul, tahun 2008).

Pemerintah Daerah Bantul segera mengedepankan nilai-nilai lokal untuk memenangkan masyarakat dengan Tata Nilai Religio-Spiritual sebagaimana dikemukakan Maladi. Dalam usaha menapaki kehidupan, manusia harus sadar bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkannya memiliki keterbatasan. Bagaimanapun juga, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Oleh karena itu, setiap orang harus ikhlas (*lila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya. Kematian, jodoh, anugerah, garis nasib, dan rejeki bagi tiap-tiap orang merupakan kepastian yang telah ditentukan oleh Tuhan (*Siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat kodrat, lima bandha*). Manusia sekadar menjalani hidup ini (*manungsa saderna nglakoni, kaya wayang upamané*) sebagaimana digariskan oleh Tuhan. Akan tetapi, nilai-nilai seperti itu bukan berarti mengajak manusia untuk pasrah total tanpa usaha dalam hidup (*fatalistik*), melainkan dimaksudkan sebagai kerendahhatian agar hendaknya manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja (*rumangsa bisa*), namun harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya (*bisa rumangsa; ngrumangsani*), jangan mendikte kehendak Tuhan (*aja nggégé mangsa*), dan pandai-pandailah bersyukur (*narima ing pandum*).

Pendekatan tata nilai religio spiritual ini juga diikuti dengan langkah konkrit untuk mengatasi kepanikan tersebut. Idham

Samawi sebagai Bupati Bantul segera berinisiatif dengan mendirikan Posko Gempa dan dapur umum di rumah dinasnya, menyediakan konsumsi dan tenda untuk korban dan keluarga yang menunggu di rumah sakit dan semua dokter di Kabupaten Bantul segera kembali bertugas (laporan Bappeda 2008). Pada tahap tanggap darurat persoalan yang banyak memicu konflik dalam masyarakat adalah:

*Pertama*, masalah pendistribusian bantuan baik logistik maupun obat-obatan, penanganan korban luka maupun meninggal, identifikasi kerusakan. Distribusi bantuan logistik maupun obat-obatan yang tidak merata disebabkan karena cakupan wilayah yang terkena cukup luas dan ada wilayah-wilayah yang terisolir yang sulit dijangkau. Persoalan lain koordinasi yang belum berjalan di jajaran pemda Bantul menyebabkan penanganan tanggap darurat terutama mendistribusikan bantuan logistik yang berupa bahan makanan dan obat-obatan dari berbagai pihak tidak tertangani dengan baik.

*Kedua*, adalah penanganan korban baik yang meninggal dunia ataupun yang selamat. Penanganan korban yang selamat, terutama agar segera mendapatkan perawatan kesehatan sehingga dapat terselesaikan. Sebagian dari mereka ada yang tertolong dan ada yang tidak tertolong. Mereka yang tidak tertolong bisa disebabkan keterbatasan layanan medis, pada waktu itu luka-luka berat maupun ringan. Data sampai Juni 2006 terdapat 28.671 orang yang luka. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga medis dan pramedis terbatas, infrastruktur juga banyak yang rusak tercatat Puskesmas yang rusak/roboh total mencapai 8 buah, rusak berat 7, rusak ringan 11 Puskesmas pembantu rusak total 4, rusak berat 30, rusak ringan 33.

*Ketiga*, penanganan korban selamat, khususnya berkait dengan tempat untuk mengungsi dan penyediaan bahan

makanan (termasuk makanan dan susu bayi), obat-obatan, tenda, selimut dan lainnya.

*Keempat*, persoalan yang terkait dengan pendataan korban. Persoalan ini terkait dengan akurasi data dalam situasi penuh ketidakpastian dan kepanikan. Dalam situasi data akan selalu berubah, hal ini membuka potensi ketidakpercayaan, ketidakpastian penyaluran bantuan dan persoalan lainnya.

Dalam mengatasi persoalan ini budaya lokal masyarakat Yogyakarta yaitu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya yang potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*). Dengan demikian seluruh sumber daya itu dapat terkonsentrasi (*sawiji*) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan.

Korban yang meninggal juga tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan tenaga (terutama desa yang jumlah korban meninggal banyak). Di Dusun Lumutan, Kecamatan Bambanglipura ada satu keluarga ada yang kehilangan 5 orang anggotanya. Hal ini menimbulkan konflik dalam individu berupa trauma psikis. Berikut ungkapan konflik batin dari informan:

"... kami waktu itu mengurus diri sendiri dan anggota keluarga kami yang meninggal atau luka-luka. Jenasah kami kuburkan dengan kain kafan seadanya, bahkan kami harus menggali kubur sendiri. Situasi ini menimbulkan trauma dan konflik batin karena tidak tega melihat jenasah saudara-saudara kami.." (penuturan Mukijo pada saat FGD, 20 Juni 2008).

Sementara korban yang luka-luka di bawa ke rumah sakit dan terpaksa dirawat di luar rumah sakit. Masyarakat merasakan kelambanan dalam pelayanan kesehatan sehingga banyak korban yang tidak tertolong. Situasi ini menyebabkan konflik antara

pasien dengan petugas rumah sakit. "...Waktu itu banyak yang ingin segera dilayani, ingin didahulukan di tangani. Padahal waktu itu ada keterbatasan tenaga paramedis..." (tutur Novi Astuti ketika memberikan gambaran situasi di rumah-rumah sakit).

Konflik yang muncul pada fase tanggap darurat perlu ditangani dengan penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi dalam menangani masalah gempa ini oleh pemerintah daerah dianggap penting. Pemerintah berusaha mengkomunikasikan agar masyarakat memiliki cara pandang positif terhadap berbagai langkah yang akan ditempuh sehingga bisa memupuk rasa percaya diri dan sikap percaya kepada pemerintah. Cara pandang positif amat dibutuhkan terutama ketika muncul suatu masalah, seperti ketika muncul suatu masalah antara kelompok masyarakat dengan pemerintah, seperti terjadinya perbedaan dalam penghitungan dan penyajian data.

"... adanya sikap positif warga maka akan menimbulkan sikap partisipatif mengingat pendataan membutuhkan kerjasama dengan masyarakat, lebih-lebih pendataan dilakukan dalam situasi panik, pihak yang melakukan pendataan juga banyak yang menjadi korban..." ungkap Dendi Sulistyowibowo Subag Monitoring Administrasi Pembangunan Pemda Bantul (wawancara, tanggal 7 Juli 2008).

Sementara pemerintah melalui perangkat yang ada mulai ditingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten berusaha meminimalkan cara berpikir masyarakat yang negatif mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Sikap negatif ini menyebabkan kurang percaya diri, curiga dan sejenisnya dan akan menjadi beban tambahan lainnya.

"...salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan munculnya cara pandang negatif adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk

menyampaikan keberatan atau informasi-informasi bila ada terjadi penyimpangan di lapangan dengan menyediakan buku pengaduan. Pengaduan dari masyarakat ini akan kita tindak lanjuti..." (wawancara dengan Novi Astuti, 7 Juli 2008).

Buku pengaduan pada saat tanggap darurat dibuka sampai bulan 7 Juni – Oktober 2006 di pendopo Kabupaten dan Rumah Dinas Bupati. Setelah bulan Oktober 2006 hingga Februari 2007 dilakukan di bagian Administrasi pembangunan. Mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut:

Pengaduan ditulis dalam buku aduan. Salah satu aduan yang dituliskan warga adalah sebagai berikut:

"...saya sebagai warga dusun Sorogenen belum mendapatkan bantuan dan rumah kami tergolong rusak berat sedangkan rumah kami dihuni 3 KK yang tidak mampu. Sementara yang mendapatkan bantuan baru satu. Saya mohon kebijakan... (dikutip dari aduan yang disampaikan Akhmad Gofari Sorogenen Timbul Harjo Sewon, Bantul Rt 03/RW 44).

Menurut Novi, jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan sebanyak 10.000 orang, Pengaduan tersebut di *crosscheck* dan dari jumlah itu yang aduannya sesuai realita mencapai 3000 orang. Aduan lebih banyak terkait dengan dana rekonstruksi. "... kami yang ada di Bagian Administrasi Pembangunan berusaha melayani pengaduan dengan baik, namun masih saja menjadi tumpuan kekesalan..." ungkap Dendi pegawai Pemda Bantul.

Masyarakat Yogyakarta berusaha meminimalkan dampak konflik dengan bahu membahu menangani persoalan distribusi logistik agar bisa mencukupi selama masa tanggap darurat. Selain itu masyarakat bahu membahu menangani korban yang selamat maupun meninggal walaupun ada anggota keluarganya yang menjadi korban.

Melalui komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah walaupun dilakukan secara tidak langsung maka

persoalan-persoalan yang muncul pada saat pasca gempa bisa diminimalkan. Pemerintah Kabupaten Bantul berusaha menindaklanjuti persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat akibat gempa bumi. Langkah yang dilakukan pemerintah daerah ini merupakan wujud dari sikap pemimpin harus mengambil tanggung jawab terdepan dalam menyelesaikan permasalahan (*hamengkoni*) agar rakyat terbebas dari kesulitan dan kesengsaraan; dan rakyat merasa terlindungi oleh pemimpinnya. Sebagai contoh, Banyak keluarga korban yang meminta bantuan kepada bupati agar menyediakan kain kafan. Bupati tidak mungkin menyediakan karena jumlah korban yang meninggal cukup banyak. Bupati hanya memberikan nasihat agar korban yang meninggal dikafani dengan kain jarik atau apa saja yang dapat menggantikannya (dikutip dari pernyataan Bupati di dalam Bantul Bangkit).

Dalam membersihkan puing-puing bangunan rumah pasca gempa persoalan ini budaya lokal masyarakat Yogyakarta yaitu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*), sehingga seluruh sumber daya itu dapat terkonsentrasi (*sawiji*) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan.

Masyarakat Bantul Yogyakarta berusaha meminimalkan dampak konflik dengan bahu membahu menangani persoalan distribusi logistik agar bisa mencukupi selama masa tanggap darurat. Selain itu masyarakat bahu membahu menangani korban yang selamat maupun meninggal walaupun ada anggota keluarganya yang menjadi korban.

Konflik pasca gempa memicu konflik berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah pada fase *recovery* dan rekonstruksi, dimana dalam fase ini proses

pendataan tingkat kerusakan akibat gempa kurang valid. Padahal data tersebut digunakan untuk menentukan jumlah bantuan dari pemerintah. Selain itu konflik juga dipicu melalui pernyataan Yusuf Kalla (wakil Presiden) menjanjikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan Rp 30 juta kepada setiap keluarga korban yang dikategorikan mengalami kerusakan parah. Padahal realisasi jumlah bantuan tidak sebesar itu.

Di sini masyarakat beramai-ramai mengharapkan agar mereka didata sebagai korban dengan kerusakan parah, walaupun ada masyarakat yang sengaja menghancurkan rumahnya demi memperoleh bantuan. Konflik dalam proses pendataan ini hampir saja membawa masyarakat Yogyakarta kehilangan jati dirinya yaitu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.

Pemda Bantul kemudian kembali mencoba mengingatkan kembali masyarakatnya untuk mengedepankan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dalam rangka meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*). Masyarakat Yogyakarta selalu berusaha keras bersatupadu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*), sehingga seluruh sumber daya itu dapat terkonsentrasi (*sawiji*) untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan.

Semua langkah itu harus diayunkan dengan senantiasa disertai semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*). Dengan segala potensi yang dimilikinya. Masyarakat Yogyakarta senantiasa percaya diri dalam bertindak (*sungguh*), tidak

akan mundur setapak pun (konsisten) dan siap menanggung segala risiko apa pun (konsekuen) yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab (*lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani*) demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

Pemerintah daerah senantiasa mengingatkan masyarakatnya untuk bangkit setelah pasca gempa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. *Supporting* ini juga diikuti dengan regulasi formal yang diharapkan bisa mempermudah implementasi yaitu (1) Keputusan Bupati Bantul Nomor 169 tanggal 2 Juni 2006 tentang penetapan klasifikasi kecamatan sebagai dasar pemberian uang lauk pauk dan warga korban gempa bumi Kabupaten Bantul dengan kualifikasi tingkat kecamatan dengan kualifikasi sangat parah, tingkat kecamatan dengan kualifikasi kritis/rawan sosial, tingkat kecamatan dengan kualifikasi sedang, (2). SK Bupati Bantul Nomor 166 tahun 2006 tentang pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Penungsi.

Dalam proses pendataan terdapat keraguan atas data yang masuk. Walaupun sudah dilakukan secara berjenjang. Hal ini disebabkan: (a) sempitnya waktu yang disediakan untuk pendataan. Waktu yang disediakan hanya 4 hari, (b) pihak yang melakukan pendataan juga menjadi korban, (c) infrastruktur yang belum pulih. Disini pemerintah daerah memberikan ruang dialog yang luas kepada warganya dengan tetap memberikan kesempatan memberikan masukan terhadap masukan masyarakat melalui mekanisme yang telah disediakan.

Pemda dalam pendataan ini mencoba menyamakan persepsi tentang terminologi "korban bencana" yaitu mereka yang rumahnya rusak total/roboh, rusak berat dan rusak ringan. Semua warga yang bermukim di Bantul, baik yang secara administratif tercatat sebagai penduduk Bantul maupun

tidak yang terkena akibat dari gempa adalah "korban bencana". Pendekatan ini digunakan karena kenyataan banyak orang yang bermukim di Bantul tetapi belum tercatat sebagai penduduk secara administratif (ber KTP) di Bantul seperti para mahasiswa, santri yang tinggal di pesantren-pesantren di Bantul.

" .... untuk menghindari adanya kecemburuan sosial maka semua warga yang bermukim sebagai penduduk Bantul maupun tidak yang terkena gempa adalah "korban gempa" karena dalam kenyataan banyak masyarakat yang bermukim di Bantul masih belum tercatat secara administratif. Langkah ini ditempuh untuk menghindari adanya kecemburuan yang bisa merusak sendi-sendi sosial dalam masyarakat..." ungkap Dendi Sulistyowibowo Subag Monitoring Administrasi Pembangunan Pemda Bantul, 2008.

Mengedepan budaya lokal untuk menumbuhkan semangat serta rasa percaya diri kepada masyarakatnya yang tertimpa bencana, pemerintah Kabupaten Bantul mencanangkan program "BANTUL BANGKIT". Slogan ini dimunculkan pada fase recovery yaitu satu tahap pemulihan kondisi kejiwaan "trauma" serta kemampuan produktivitas korban sehingga roda kehidupan dan penghidupan dapat segera bergulir seperti sedia kala atau menjadi lebih baik.

Dalam tahap ini pemerintah setempat beserta jajarannya memberikan sosialisasi bahwa Bantul Bangkit harus bukan berasal dari orang lain. "...Kami mencoba menakutkan masyarakat bahwa yang namanya bantuan pada suatu saat akan berhenti. Kabangkitan hanya berlangsung manakala masyarakat bangkit melalui usaha dan kerja keras.." (wawancara dengan Kasi Linmas Muhjalil tahun 2008).

BANTUL BANGKIT ini juga diterapkan dalam mendorong perbaikan sektor riil masyarakat didorong untuk beraktivitas sesuai dengan pekerjaannya semula.

Sebagai contoh, petani segera didorong kembali bekerja di sawah, para pedagang kembali ke pasar. Di sektor riil yang mendesak dan menjadi prioritas adalah pembenahan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana irigasi, perbaikan jembatan yang rusak, subsidi bibit, rehabilitasi pasar, pemberian stimulan pembangunan sarana peribadatan, pemberian modal dan alat-alat industri rumah tangga, pembangunan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta program mendesak lainnya.

Pihak pemda Bantul pada fase pemulihan ini juga mengembangkan program *Community Development* yang bermakna untuk mengangkat harkat masyarakat sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Program ini didukung dengan APBD tahun 2006. *Community Development* yang berbasis pedukuhan ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat miskin dalam menciptakan dan menangkap peluang usaha produktif dan perluasan pemasaran untuk dapat meningkatkan pendapatan sekaligus membuka lapangan kerja baru. Sasaran program ini adalah keluarga miskin yang telah membentuk kelompok untuk modal awal Rp10 juta.

"... modal tersebut menjadi kekayaan kelompok yang berupa modal tetap, modal usaha, upah dan penyusutan dengan proporsi sesuai kesepakatan dalam musyawarah kelompok. Kelompok ini akan didampingi oleh seorang pendamping..." (wawancara dengan Novi Astuti, ST Subag Teknik Administrasi Pembangunan Pemda Bantul, 2008).

Kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi salah satu strategi dari Pemda Bantul dalam melaksanakan rencana aksinya. Keterlibatan NGO pada fase recovery ini antara lain pemulihan trauma korban melalui fase pemulihan bidang pendidikan, kesehatan, sarana perubadatan, stimulan pembersihan rumah dan fasilitas umum, bantuan rumah Badeng.

Puskesmas yang menjadi ujung tombak kesehatan belum mampu menangani seluruh pasien secara maksimal sehingga pemda Bantul didukung Departemen Kesehatan, NGO dan organisasi profesi dan lintas sektor menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang kesehatan. Peserta kegiatan adalah paramedis dan kader kesehatan.

Pembenahan fasilitas umum pemda memberikan stimulan tiap RT Rp 1 juta. Dasar kebijakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 11 tahun 2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Partisipasi Masyarakat Desa. Bantuan diberikan setelah RT mengajukan permohonan/proposal yang diketahui lurah.

"... berdasarkan evaluasi kami bantuan stimulan tersebut mampu memompa semangat warga masyarakat untuk segera bangkit dari keterpurukan. Tingginya partisipasi masyarakat menyebabkan puing-puing rumah, fasilitas umum akibat gempa bisa segera dibersihkan sehingga banyak pihak yang tidak mengira bahwa di wilayah ini pernah terjadi gempa..." (wawancara dengan Novi Astuti Pemda Bantul, 2008).

Dalam memberikan bantuan untuk tahap rekonstruksi, pemerintah daerah cukup hati-hati dengan mengedepankan budaya lokal yaitu paham masyarakat (*bebrayan agung*) dipahami sebagai suatu keluarga tetapi keluarga yang besar.

"...mengingat tahap I jumlahnya terbatas kami tidak mau gegabah dalam menentukan sasaran yang akan menerima bantuan. Masyarakat yang dianggap final menerima bantuan bila telah dilakukan pencermatan oleh POKMAS bersama fasilitator (pendamping) dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) yang diketahui pemerintah secara berjenjang setelah dilakukan verifikasi kenyataan di lapangan..." (wawancara Novi Astuti Pemda Bantul, 2008).

Mekanisme yang dikembangkan oleh pemerintah dalam proses rekonstruksi ada beberapa keluhan dari masyarakat tentang rumitnya birokrasi. Hal ini dapat dipahami mengingat: (1) kuatnya kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan program, (2) kuatnya kebutuhan untuk menjalankan prinsip-prinsip *good government* (3) Kuatnya kepentingan melibatkan program yang sepenuhnya bertumpu pada keterlibatan korban.

"... dapat dikatakan bahwa format korban merupakan pertemuan antara keinginan penyelenggaraan tata kelola yang baik dan kepentingan melibatkan masyarakat dengan berbasis kearifan lokal..." papar Novi Astuti Subag Teknik Administrasi Pembangunan Kabupaten Bantul, 2008).

Pada pelaksanaan fase ini berjalan di tengah nuansa kekecewaan masyarakat pasca janji pemerintah. Nuansa ini menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Di sisi lain, data yang tersusun juga ada perbaikan terus menerus sehingga masyarakat semakin tidak yakin dengan data yang dimiliki pemerintah terkait dengan jumlah korban dan tingkat kerusakan rumah. "... pada fase rekonstruksi ini sangat berat bagi kami dari perangkat RT dimana data mulai disusun. Tidak jarang juga muncul pahlawan kesiangan yang semakin memperkeruh suasana..." ujar Widodo (hasil FGD, 2008).

Persoalan yang terkait dengan dana rekonstruksi juga diselesaikan melalui *rembug desa*, seperti yang terekam dalam media. Setelah dana rekonstruksi cair, apakah akan dibelanjakan bersama melalui pokmas atau dibagi langsung kepada masing-masing anggota? Jumiran, Ketua Pokmas 12 Dusun Paten, Desa Srihardono, Kec. Pundong memilih untuk membelanjakan dana rekonstruksi secara bersama melalui pokmas. Tapi kalau toh ada warga yang ingin belanja sendiri, dipisahkan karena dan itu sudah menjadi haknya. Agus,

Ketua Pokmas V Dusun Tulung, Desa Srihardono, Kec. Pundong akan berembung dulu dengan anggota untuk membuat mekanisme pembagian/ pembelanjaan dana. Patuh pada aturan yang dibuat pemerintah menjadi prinsip mereka. "Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan." (Bernas, 14 Oktober 2006).

Tukijan, Ketua Pokmas 12 Dusun Cembing, Desa Trimulyo, Kec. Jetis membebaskan para anggotanya untuk memilih apakah ingin belanja lewat pokmas atau tidak. Para anggota pokmas yang telah belanja harus menyerahkan bukti pembelian dari toko bahan bangunan. Yang penting toh untuk pembangunan rumah, bukan untuk belanja yg sifatnya konsumerisme. Jamhari, anggota Pokmas 13 Dusun Cembing, Desa Trimulyo, Kec. Jetis mengaku bahwa sebagian besar anggota Pokmas 13 belanja sendiri material untuk bangunan rumah mereka. Setelah belanja lantas menunjukkan nota pembelian untuk mendapat ganti dana dari pokmas. Meskipun demikian ada pula beberapa anggota yang lebih suka belanja melalui pokmas (Bernas, 14 Oktober 2006) Kondisi inilah yang menyebabkan pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat yang akan menyampaikan keluhan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait pasca gempa Dalam buku pengaduan yang disediakan oleh Pemda Bantul.

Selain itu pemerintah Bantul sangat menyadari bahwa pasca gempa ada sendi-sendi budaya lokal, karakter lokal juga ikut terkikis sehingga kobflik yang muncul tidak terselesaikan dengan baik. Terkait dengan hal itu maka pemerintah Bantul mencanangkan tahap rekonsiliasi. Dimana pejabat pemda akan menjadi babak asuh untuk kembali menyatukan masyarakat.

"... pasca gempa telah banyak terjadi kecemburuan sosial, hubungan antar masyarakat renggang, bahkan konflik dalam keluarga juga muncul. Bapak asuh ini akan mengkoordinir kegiatan yang bisa menyatukan kembali masyarakat.

Bentuknya macam-macam, bisa membuat kegiatan bersama-sama memberantas penyebaran nyamuk penyebab demam berdarah," ujar Kasi Linmas Muhjilil,2008).

Kegiatan yang membangun rekonsiliasi ini dilakukan secara serentak di semua Kabupaten Bantul dimaksudkan agar masyarakat bisa berinteraksi selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Manajemen konflik yang banyak dilakukan oleh masyarakat korban gempa di Bantul Yogyakarta tergolong manajemen kerelaan membantu dan kompromi sesuai gaya manajemen dari Meyers.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa manajemen konflik dalam masyarakat pada dasarnya bisa diselesaikan dengan mengedepankan budaya lokal. Budaya lokal yang dimiliki satu wilayah pada dasarnya merupakan jati diri masyarakat tersebut. Kendati sempat terpuruk, masyarakat Bantul tidak akan pernah kehilangan jati dirinya yaitu bagaimana menyelesaikan konflik dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Pendekatan semacam ini ternyata mampu mempercepat pulihnya Kabupaten Bantul untuk senantiasa bangkit dari keterpurukan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat konflik pasca gempa di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Konflik terjadi pada level : tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Jenis konflik sosial yang terjadi antara lain: konflik intrapersonal (tekanan batin dalam diri individu), antarpersonal (kecemburuan bantuan), dalam kelompok (terjadi perbedaan persepsi tentang bantuan di kalangan masyarakat, pemerintah, dan pendonor), dan konflik antar kelompok masyarakat dengan pemerintah, pemerintah dengan pendonor, terkait proses rekonstruksi dan rehabilitasi.



2. Penyebab konflik secara umum antara lain: ketidakjelasan informasi, sumber daya atau pun dana terbatas, tugas yang saling tergantung, penghalang komunikasi (jarak, teknologi), perbedaan watak atau persepsi antarindividu, dan lain-lain.
3. Manajemen konflik yang dilakukan mengacu pada Tata Nilai Budaya Lokal Yogyakarta, antara lain:
  - Tata Nilai Religio – Spiritual. Misalnya Masyarakat korban gempa saling membantu dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme, melainkan rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*) bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*).
  - Tata Nilai Moral. Misalnya Para korban gempa yang mengalami konflik segera ingat bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya (*ngunduh wohing pakarti*). Perbuatan baik akan berbuah kebajikan, perbuatan buruk akan berbuah keburukan (*sapa kang nandur bakal ngunduh, sapa kang gawé bakal nganggo, sapa kang utang bakal nyaur*).
  - Tata Nilai Kemasyarakatan. Misalnya, Masyarakat yang mengalami konflik segera ingat bahwa kerukunan memberikan kekuatan, sedangkan pertikaian mendatangkan kehancuran (*rukun agawé santosa, crah agawé bubrah*). Konflik di antara anggota masyarakat, segera diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan (*ana rembug ya dirembug*) demi solidaritas atau kesetiakawanan sosial antaranggota masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah (*sabaya mati, sabaya mukti*). Semua itu dalam rangka menjaga kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*), agar dapat memberi perasaan aman dan damai (*ayom ayem*).
- Tata Nilai Kepemimpinan dan Pemerintahan. Misalnya dalam situasi yang sulit (saat bencana gempa), pemimpin mengambil tanggung jawab terdepan dalam menyelesaikan permasalahan (*hamengkoni*) agar rakyat terbebas dari kesulitan dan kesengsaraan; dan rakyat merasa terlindungi oleh pemerintah. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh Bupati Bantul dan jajaran pemerintahannya yang sigap dalam menangani korban gempa baik saat tanggap darurat, rekonstruksi, maupun rehabilitasi.
- Tata Nilai Kejuangan dan Kebangsaan. Misalnya, Warga Bantul dengan semangat berani dan rela berkorban, kesetiakawanan sosial (solidaritas; *sabaya pati, sabaya mukti*), persatuan dan kekompakan (*saiyek saéka prayà*) baik antarpemimpin, antarrakyat, maupun antara rakyat dan pemimpin (*manunggaling kawula gusti*), jiwa tanpa pamrih, cinta tanah air (patriotisme), rasa kebangsaan (nasionalisme), dan kegigihan menjaga martabat bangsa dan negara (*sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira*) dalam pemulihan pasca gempa melalui gerakan "BANTUL BANGKIT".
- Tata Nilai Semangat Keyogyakartaan. Misalnya, Masyarakat korban gempa di Bantul Yogyakarta selalu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya baik yang aktual maupun yang masih potensial dari semua pihak, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan, baik atasan maupun bawahan, baik pemimpin maupun rakyat (*golong gilig*), sehingga seluruh sumber daya itu dapat

terkonsentrasi (sawiji) untuk menyelesaikan segala persoalan pasca gempa 2006.

4. Budaya lokal yang dimiliki masyarakat korban gempa di Bantul merupakan jati diri masyarakat Bantul Yogyakarta yang juga merupakan kekayaan dan jati diri Bangsa Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Handoko, Hani, 1997, *Manajemen*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto P, 2006, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hendricks, William, 2008, *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk manajemen konflik yang efektif*, Penerjemah oleh Arif Santoso. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Lestari, Puji, 2002, *Konflik Komunikasi di Kalangan Karyawan PT.Grafindo Media Pratama Cab. Ygyakarta*, Jurnal Paradigma Volume 6, Nomor 17, Juni 2002, FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta.
- , 2007, *Manajemen Komunikasi bencana di Daerah Rawan Bencana (Studi pada bencana gempa bumi di Kecamatan gantiwarno Klaten)*, Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 5 Nomor 3, September-Desember 2007 Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN "Veteran", Yogyakarta.
- Maladi, Agus, 2009, *Saresehan Kearifan Lokal Provinsi Jawa Tengah*, Di Hotel Telomoyo.
- Semarang yang diselenggarakan tanggal 29 Januari 2009 oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng, dalam <http://staff.undip.ac.id/sastra/agusmaladi/2009/02/28/mahasiswa-dan-kearifan-lokal/>
- Nugroho, Heru, Dkk, 2008, "*Politik Bumi dan Manajemen Bencana*" dalam Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi I/Juni/TahunII/2008., Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Pruitt, Dean.G dan Jeffrey Z.Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pickering, Peg, 2006, *Kiat Menangani Konflik: Jadikan Konflik sebagai Kesempatan untuk Maju*, Edisi ketiga, Penerjemah Masri Maris, Esensi, Jakarta.
- Robbins, Stephen, P, 1984, *Essentials of Organisation Behavior*, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs.
- Rosyid, 2007, *membangun-jati-diri-bangsa-sebuah-tantangan-kreatif*, dalam <http://dmrosyid.wordpress.com/2007/06/16/membangun-jati-diri-bangsa-sebuah-tantangan-kreatif/>
- Sriyanto, Agus, 2007, *Konflik Berbasis Budaya Lokal*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, lbda' Vol.5, No.2, Jul-Des 2007, 286-301 1 P3M STAIN, Purwokerto.
- Wexley, Kennet & Gary A. Yukl, 1988, *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personalial*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Winardi, 1984, *Manajemen Konflik : Konflik Perubahan dan Pengembangan*, Mandar Maju., Bandung.
- Majalah "Bantul Bangkit", tahun 2007.
- SKH Kompas , Edisi Yogyakarta ,13 Februari 2007.
- SKH Kedaulatan Rakyat, 29 November 2006.
- SKH Bernas, 14 Oktober 2006.
- Laporan Bappeda, Bantul, tahun 2008.
- <http://primantoro.web.id/?p=105>